

---

## Kinerja Dinas Perhubungan Dalam Menata Perparkiran Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mimika

Jenny Valeria Kainde<sup>1</sup>

Herman Nayoan<sup>2</sup>

Welly Waworundeng<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Organisasi pemerintah adalah sebuah organisasi yang mempunyai tujuan, untuk melayani masyarakat. Pada tingkat Organisasi, kinerja yang kurang berkualitas adalah akibat atau hasil dari kepemimpinan yang kurang berkualitas, manajemen yang kurang profesional, atau system kerja yang tidak baik. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana Kinerja Dinas Perhubungan dalam Menata Kinerja Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mimika. Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 3 Faktor yang mempengaruhi Kinerja Menurut Simanjuntak yaitu Dukungan Organisasi, Kemampuan dan Efektifitas Manajemen, serta Kinerja Setiap Orang dalam Organisasi. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Kinerja Dinas Perhubungan dalam menata perparkiran kendaraan bermotor belum optimal dikarenakan dukungan organisasi berupa sarana rambu larangan parkir di beberapa titik masih kurang, kemampuan dan efektifitas dalam mengatasi parkir liar terfokus pada penggembokan dan penilangan hanya memberikan efek jera sementara bagi masyarakat yang melanggar aturan parkir, terkait kinerja setiap orang dalam organisasi perlu di tingkatkan lagi baik di bidang sekretariat maupun teknis.

**Kata Kunci : Kinerja, Organisasi, Parkir**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Perparkiran adalah salah satu masalah yang sering sekali dijumpai dalam hal transportasi, terutama penyebab kemacetan yang sedang merajalela di berbagai kota besar yang sedang berkembang, begitupun Indonesia. Perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut hampir diseluruh daerah yang ada di Indonesia. Parkir kendaraan bermotor liar dapat mengganggu keindahan kota apabila tidak dilakukan penataan dengan baik. Pada umumnya kendaraan yang parkir di pinggir jalan berada disekitar tempat atau pusat kegiatan seperti sekolah, kantor, pasar swalayan, pasar tradisional, rumah makan, dan lain-lain.

Kondisi pelayanan parkir yang tidak baik memberikan gangguan bagi sistem lalu lintas salah satunya adalah kemacetan. Kemacetan timbul sebagai akibat adanya ketidak lancarannya lalu lintas sehingga cukup mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat. Lalu lintas sangat penting bagi seluruh masyarakat, aktivitas akan berjalan dengan baik setiap harinya apabila lalu lintas berjalan dengan lancar pula. Aktivitas di dalam kehidupan banyak dilakukan diluar rumah, maka dari itu jalan raya adalah objek yang sangat penting karena digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas berpergian.

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik kendaraan roda dua maupun roda empat, mengakibatkan kebutuhan terhadap lahan parkir yang ada di tepi jalan umum juga meningkat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lahan parkir di tepi jalan umum juga harus disesuaikan dengan kondisi jalan yang ada di suatu wilayah. Pengaturan tentang parkir di tepi jalan umum diatur di beberapa peraturan perundangundangan.

Tercantum dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan pasal 1 Nomor 15 bahwa: "Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau

tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya". Masih dalam undang-undang yang sama , tercantum pada bagian kedua paragraph 7 pasal 120 bahwa : "Parkir kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas."

Pemerintah telah memberikan kejelasan mengenai kriteria parkir. Parkir merupakan salah satu prasarana jalan yang ada di suatu wilayah. Penyediaan fasilitas parkir diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa, penyediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum, hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan rencana umum tata ruang, analisis dampak lalu lintas dan kemudahan bagi pengguna jasa.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, yang dimaksud dengan terganggunya fungsi jalan adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang / benda / materil di bahu jalan, berjalan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat.

Pembangunan sarana dan prasarana di bidang lalu lintas khususnya di bidang perparkiran merupakan Kewenangan, Tugas, Pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan. Keberadaan parkir liar yang mengganggu baik lalu lintas maupun pendapatan daerah harus ditanggapi dengan cepat oleh Pemerintah kota hendaknya persuasif dan proaktif melakukan upaya pencegahan dan penertiban dengan langkah yang

bijaksana. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat luas.

Penanggulangan parkir liar oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan publik sehingga harus menimbulkan dampak yang bisa dinikmati. Parkir liar sebagai kelompok sasaran harus benar-benar telah memahami tujuan program dan patuh terhadap peraturan yang ada. Pemerintah dalam hal ini Dinas perhubungan, memerlukan strategi yang baik dalam menanggulangi parkir liar di kabupaten Mimika.

Agar tercipta ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Mimika, maka perlu menata ulang tata laksana perpajakan, sehingga disini pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah kabupaten Mimika No. 25 Tahun 2010 Retribusi Tempat Khusus Parkir. Pada penerapannya tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan.

Sehingga ini menjadi tugas dan pekerjaan besar, Dinas perhubungan dalam meningkatkan kinerja dalam mengatasi perpajakan liar yang sering terjadi di Kabupaten Mimika. Pemerintah kabupaten Mimika melalui Dinas Perhubungan diharapkan dapat melakukan upaya dalam menanggulangi parkir liar yang cukup mengganggu keindahan kota.

### **Tinjauan Pustaka**

Menurut Wibowo (Surajiy, dkk. 2020:8) kinerja berasal dari pengertian *Performance* yaitu sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja adalah hasil yang dicapai atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan sesuai dengan tanggung jawabnya selama periode tertentu.

Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Kinerja dapat diartikan sebagai penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu perusahaan, bagian dari perusahaan dan pegawainya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja berasal dari kata *to*

*perform* yang artinya melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan.

Menurut Bernadin dan John (Suwatno 2019:156) Kinerja adalah hasil yang diproduksi oleh fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan-kegiatan pada pekerjaan tertentu selama periode waktu tertentu. Hasil kerja tersebut adalah hasil dari kemampuan, keahlian, dan keinginan yang dicapai. Menurut Suwatno (2019:156) Kinerja adalah Perwujudan dari kemampuan dalam bentuk karya nyata. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam mengemban tugas dan pekerjaan yang berasal dari Organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut kinerja adalah perwujudan dari pekerjaan yang telah dihasilkan atau diemban pegawai. Hasil tersebut tercatat dengan baik sehingga tingkat ketercapaian kinerja yang seharusnya dengan apa yang terjadi dapat dievaluasi.

Menurut Serdamayanti (2011:260) Kinerja didefinisikan Sebagai hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan). Dimensi kinerja menurut Sedarmayanti adalah :

- a. Hasil kerja
- b. Pekerja, proses atau Organisasi
- c. Terbukti secara konkrit
- d. Dapat diukur
- e. Dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan.

### **Kinerja Organisasi**

Menurut Mahsum (Sembiring 2012:81) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.'

Untuk mmenilai Kinerja Juga dapat melalui pendekatan *input, proccess, outputs* yang berarti apa yang terjadi dalam sebuah proses yang mengolah *input* menjadi *Output* ( Dharma, 2002 : 17)

1. *Inputs* meliputi masalah, informasi, waktu, teknologi, dan sebagainya.
2. *Proses* ditekankan pada upaya atau aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengola *Input* menjadi *Output*
3. *Outputs* ditekankan pada hasil langsung yang diharapkan dicapai dari kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing satuan organisasi

Semakin baik kinerja suatu organisasi maka akan semakin baik pula pelayanan terhadap masyarakat. Bagi suatu organisasi, kinerja merupakan hasil dari kegiatan kerjasamadiantara anggota atau komponen organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi.

### **Konsep Perangkat Daerah**

Perangkat daerah disusun berdasarkan adanya urusan pemerintahan yang harus ditangani. Namun, tidak semua urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 18 tahun 2016. Hal ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan

tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

### **Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi**

Meningkatkan kinerja dapat dilakukan pada Organisasi dan Individu. Pada tingkat Organisasi , kinerja yang kurang berkualitas adalah akibat atau hasil dari kepemimpinan yang kurang berkualitas, manajemen yang kurang profesional, atau system kerja yang tidak baik. Untuk mencapai peningkatan kinerja yang berkualitas dan mengatasi masalah yang ditemui dalam upaya untuk meningkatkan kinerja maka perlu di terapkan beberapa strategi.

Menurut Simanjuntak (Onita Sinaga, dkk. 2020:21) sebuah kinerja Organisasi dipengaruhi oleh 3 Faktor utama yaitu:

1. Dukungan organisasi, berupa : struktur organisasi yang kompatibel, penerapan teknonologi pendukung kerja, dan lingkungan atau atmosfer kerja,
2. Kemampuan dan efektivitas manajemen, meliputi: perencanaan, pengorganisasian, penyediaan SDM, dan pengawasan yang baik.
3. Kinerja setiap orang dalam organisasi, meliputi : kompetensi individu yang sehat, Dukungan organisasi dan dukungan manajemen.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Organisasi, struktur organisasi disusun menjadi unit-unit kerja dengan pembagian tugas, sistem dan mekanisme yang jelas.Dengan demikian pencapaian sasaran kerja organisasi adalah akumulasi kinerja dari unit-unit yang ada.

Mengingat unit-unit kerja organisasi terdiri dari individu-individu, maka kinerja organisasi merupakan akumulasi kinerja semua individu yang bekerja di dalamnya. Upaya peningkatan kinerja organisasi dapat dilakukan melalui peningkatan kinerja individu anggotanya

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut sugiyono (2005) metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. yang menjadi fokus penelitian yaitu: Menurut Simanjuntak (Onita Sinaga, dkk. 2020:21) dalam bukunya Manajemen Kinerja dalam Organisasi sebuah kinerja Organisasi dipengaruhi oleh 3 faktor utama yaitu :

1. Dukungan organisasi, berupa : struktur organisasi yang kompatibel, penerapan teknologi pendukung kerja, dan lingkungan atau atmosfer kerja,
2. Kemampuan dan efektivitas manajemen, meliputi: perencanaan, pengorganisasian, penyediaan SDM, dan pengawasan yang baik.
3. Kinerja setiap orang dalam organisasi, meliputi : kompetensi individu yang sehat, Dukungan organisasi dan dukungan manajemen Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles dan Huberman (1984)

informan yang menjadi sasaran penelitian yaitu :

1. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika
2. Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika

3. Staf Dinas Perhubungan Bidang Darat

4. Masyarakat Pengguna Parkir  
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut esterberg (2002) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar pikiran informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu

### Pembahasan

Untuk mengetahui Kebijakan Dinas Berikut ini adalah pembahasan dari hasil penelitian yang di dapat baik dari wawancara, observasi maupun data-data pendukung lainnya.

### Dukungan organisasi

Dukungan yang positif dari pimpinan dan segenap pegawai akan menciptakan situasi kerja yang kondusif. Dengan mendapatkan dukungan tersebut kinerja anggota akan terpacu untuk lebih baik. Selain itu dukungan juga memunculkan semangat para tim kerja sehingga mereka dapat saling mempercayai dan saling membantu. Didalam suatu organisasi diperlukan dukungan organisasi, apabila dukungan organisasi yang berupa struktur organisasi yang kompatibel, penerapan teknologi pendukung kerja, dan lingkungan atau atmosfer kurang baik maka akan mempengaruhi motivasi kerja anggota organisasi. Dukungan Organisasi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungan organisasi. Dengan mendapatkan perlakuan yang baik dan mendukung dari atasan atau pimpinan, para pegawai memiliki persepsi terhadap dukungan yang diberikan oleh organisasi. Organisasi membutuhkan para pegawainya untuk bisa menunjukkan kinerja yang baik agar tujuan organisasi bisa tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai dukungan organisasi dapat disimpulkan bahwa dinas perhubungan memiliki struktur yang jelas dimana peran struktur organisasi yaitu untuk menjelaskan

tanggung jawab anggota, menjelaskan kedudukan anggota dan memperjelas jalur hubungan kerja dan memperjelas uraian tugas, setiap individu atau sumber daya manusia yang berada pada lingkup dinas tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing sesuai dengan peraturan Bupati Mimika Nomor 56 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan. Dan teknologi pendukung kerja yang memadai dibuktikan dengan tersedianya computer, printer dan ac untuk menunjang kenyamanan karyawan di dinas tersebut. Kondisi lingkungan kerja Dinas Perhubungan juga sangat baik dan bersih terdapat taman dan tumbuhan hijau yang baik juga menambah keasrian lingkungan kerja. Dari dinas perhubungan juga telah menetapkan tanda dilarang parkir di beberapa titik, tetapi dari hasil observasi peneliti di lapangan masih ada beberapa titik yang belum di pasang tanda dilarang parkir sehingga masih banyak masyarakat parkir sembarangan disana.

### **Kemampuan Dan Epektifitas Manajemen**

Kemampuan dan efektivitas manajemen yang baik harus didukung dengan kemampuan sumber daya manusia yang baik yakni kemampuan, keahlian dan keterampilan. Kinerja sumber daya manusia dikatakan baik apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan yang di tetapkan. itu berarti sumber daya manusia telah mampu menjalankan program atau aktivitas yang tepat dan dapat dikatakan kinerjanya sudah epektif sebaliknya, buruknya kinerja sumberdaya manusia ditunjukan dengan ketidakmampuannya melaksanakan suatu program sesuai dengan yang telah ditetapkan. Hal itu menggambarkan kinerja yang kurang karena tidak mampu melakukan sesuatu berdasarkan kriteria yang diinginkan.

Perencanaan yang matang dalam menentukan hal yang ingin dicapai juga penting untuk mencapai kinerja yang baik, serta adanya pengawasan yang

baik agar setiap perencanaan dapat dilakukan dengan baik.

Kinerja setiap orang dalam Organisasi meliputi kompetensi individu yang sehat, dukungan organisasi dan dukungan manajemen, penyusunan program pelatihan dan pengembangan karyawan, sehingga dapat diketahui dan diidentifikasi pelatihan apa saja yang harus diberikan kepada pegawai untuk membantu agar mampu mencapai standar prestasi yang di tetapkan. kinerja menunjukkan kemampuan karyawan meningkatkan produktivitas kerjanya serta kenyamanan lingkungan kerja untuk meningkatkan motivasi kerja yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai kemampuan dan epektifitas manajemen disimpulkan bahwa Dinas perhubungan dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia sudah cukup baik berdasarkan hasil wawancara terkait diklat teknis/fungsional menunjukkan bahwa perencanaan, penyediaan sumber daya manusia serta pengawasan dilakukan agar setiap tugas dapat dilakukan dengan efektif dimulai dengan perencanaan pelatihan teknis fungsional bagi pegawai sehingga dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pengawasan dilapangan sehingga lalulintas dapat berjalan dengan baik, jika masyarakat melanggar maka akan di berikan teguran secara lisan dan tindakan sesuai aturan yang berlaku.

### **Kinerja setiap orang dalam organisasi**

Kinerja setiap orang dalam Organisasi meliputi kompetensi individu yang sehat, dukungan organisasi dan dukungan manajemen, penyusunan program pelatihan dan pengembangan karyawan, sehingga dapat diketahui dan diidentifikasi pelatihan apa saja yang harus diberikan kepada pegawai untuk membantu agar mampu mencapai standar prestasi yang di tetapkan. kinerja menunjukkan kemampuan karyawan meningkatkan produktivitas kerjanya serta kenyamanan lingkungan kerja untuk meningkatkan motivasi kerja yang baik. Kinerja setiap orang dalam Organisasi

meliputi dukungan organisasi dan dukungan manajemen, penyusunan program pelatihan dan pengembangan karyawan, sehingga dapat diketahui dan diidentifikasi pelatihan apa saja yang harus diberikan kepada pegawai untuk membantu agar mampu mencapai standar prestasi yang di tetapkan. kinerja menunjukan kemampuan karyawan meningkatkan produktivitas kerjanya serta kenyamanan lingkungan kerja untuk meningkatkan motivasi kerja yang baik.

Dari hasil wawancara menunjukan bahwa kinerja setiap orang dalam organisasi baik dukungan organisasi berupa fasilitas yang memadai untuk menunjang pekerjaan seperti penyediaan computer, printer, ac, serta lingkungan kerja yang nyaman suasana kantor yang tenang cukup baik, berdasarkan observasi dilapangan keadaan kantor Dinas Perhubungan memang cukup nyaman dan bersih. Untuk jaminan kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan hasil wawancara pegawai mendapat jaminan tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Untuk pegawai pengawasan yang turun ke lapangan hanya mendapat Dan fasilita berupa transportasi untuk melakukan pengawasan pada waktu-waktu tertentu, dan Yang peneliti temui di lapangan justru tidak ada posko penjagaan dari ndinas perhubungan agar dapat mengawasi titik yang sering sekali di langgar oleh masyarakat.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan Dukungan Organisasi Dinas Perhubngan Kabupaten Mimika memiliki struktur yang jelas , serta teknologi pendukung kerja yang cukup lengkap, Kondisi lingkungan kerja Dinas Perhubungan juga sangat baik dan bersih menambah keasrian lingkungan kerja untuk menunjang kenyamanan karyawan di dinas tersebut tetapi masih perlu ditingkatkan lagi terkait fasilitas pendukung kerja.. Dari dinas perhubungan juga telah menetapkan

tanda dilarang parkir di beberapa titik, tetapi masih ada beberapa titik yang belum diberikan tanda dilarang parkir sehingga masih banyak masyarakat parkir sembarangan disana.

2. Mengenai Kemampuan dan Ewektifitas Manajemen, Dinas perhubungs dalam hal meningkatkan kualitas sumber daya manusia sudah cukup baik seperti penyediaan sumber daya manusia serta pengawasan sudah dilakukan tetapi perlu adanya evaluasi kembali terkait pelatihan yang diberikan oleh Dinas apakah bermanfaat dan mendapatkan hasil yang baik. Terkait Perencanaan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap penertiban parkir tepi jalan belum terlihat dan belum bisa dikatakan baik dikarenakan Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika hanya terfokus pada pengembangan dan penilangan. Dinas perhubungan Kabupaten Mimika hanya memberikan efek jera sementara bagi masyarakat yang melanggar aturan parkir.
3. Kinerja setiap orang dalam Organisasi dilihat dari fasilitas yang memadai untuk menunjang pekerjaan dan motivasi kerja seperti penyediaan computer, printer, ac, serta lingkungan kerja yang nyaman sudah cukup baik tetapi perlu dilakukan pengawasan terhadap pegawai agar tidak menyalahgunakan fasilitas yang ada , pegawai juga mendapat jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan sesuai dengan aturan yang ada. Untuk pegawai yang turun ke lapangan untuk pengawasan kuirang mendapat fasilitas untuk meningkatkan kinerja mereka, dan atasan perlu meminta respon balik serta bukti dari pegawai lapangan terkait keadaan sebenarnya yang terjadi dilokasi tersebut

### **Saran**

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika hendaknya dapat meningkatkan kinerja dari segi peningkatan kualitas SDM dan peningkatan persediaan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja.

2. Dinas perhubungan kabupaten mimika lebih tegas dalam pemberian sanksi kepada kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika hendaknya tidak hanya melakukan pengembokan dan penilangan saja dalam upaya penertiban parkir tepi jalan, tetapi juga dari sisi yang lain harus bisa dijalankan.
3. Perlu dilakukan pemantauan terhadap pegawai di jam kerja agar pegawai benar-benar bekerja dengan baik. Bagi petugas pengawasan yang turun ke lapangan atasan perlu meminta respon balik serta bukti dari pegawai lapangan terkait keadaan sebenarnya yang terjadi dilokasi tersebut serta menetapkan dan membuat jadwal yang jelas mengenai deskripsi pekerjaan masing-masing
4. Dinas Perhubungan Perlu Meninjau kembali program yang sudah pernah dilakukan dalam penertiban parkir tepi jalan serta membentuk program yang lebih baik dalam upaya penertiban parkir di tepi jalan

#### Daftar Pustaka

- Hari Sulaksono. 2015. *Budaya Organisasi dan Kinerja*, Yogyakarta : Deepublish
- Onita Sari Sinaga, dkk. 2020. *Manajemen Kinerja dalam Organisasi*, Medan : Yayasan kita Menulis
- Payaman J Simanjuntak, 2005. *Manajemen dan evaluasi kinerja*, Jakarta : Fakulta Ekonomi Universitas Indonesia
- Sedarmayanti. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi Manajemen pegawai negeri sipil*, Bandung : Rafika Aditama
- Sembiring , Masana. (2012). *Budaya dan kinerja Organisasi*.Bandung : fokus media
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabet
- \_\_\_\_\_ 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabet
- Suwatno. 2019. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, Jakarta : Bumi Aksara
- Sumber-Sumber Lain**
- Darmodjo, Sentot, Dyah Hariani, and Hesti Lestari."Analisis Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Kota Surakarta)." *Journal of Public Policy and Management Review* 3.2 (2014): 212-223.
- Muabuay, B. C., Nayoan, H., & Waworundeng, W. (2021). Kinerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Dalam Pengelolaan Prasarana Olahraga di Kabupaten Mimika. *GOVERNANCE*, 1(1).
- Munandar, Muhammad Arie, and Maesaroh Maesaroh."Analisis Kinerja UPT Perparkiran Dalam Pengelolaan Parkir Di Kabupaten Kudus." *Journal of Public Policy and Management Review* 8.2 (2019): 439-454.
- Peraturan Bupati Kabupaten Mimika Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe B.
- Peraturan Daerah kabupaten Mimika No. 25 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 31 Tahun 2003 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- Tahir, M. Irwan. "Analisis Kritis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah." *Jurnal Pelayagunaan*



*Aparatur Negara* 6 (2016):153-168.  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009  
tentang Lalu Lintas dan Angkutan  
Jalan